

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta PT Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diantha dan I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Fahham, Achmad. 2019. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing.
- Gultom, Maidin. 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama: Bandung.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Agustin, Edi Darmawijaya, dkk. 2014. *Buku Dasar Hukum Keluarga*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Lamintang P.A.F, Theo Lamintang. 2011. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Loqman, Loebby. 1995. *Delik Kesusilaan (Konferensi Nasional Makalah Lokakarya BPHN 1995)*. Jakarta: Datacom.
- Manan, Bagir. 2007. *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*. Jakarta: Varia Peradilan No.258.
- Marpaung, Leden. 2011. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.

- Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- Novita Eleanora, Fransiska, dkk, 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Patawari. 2017. *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat: Perbandingan Keterwakilan Parlemen Beberapa Negara*, Makassar. UPT Unhas Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahayu, Ninik. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. CV Alfabet
- Sukriono, Didik. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, hal. 96 - 97
- Utami, Niken Subekti Budi. *Problematika Permohonan Grasi Menurut Undangundang Nomor 22 Tahun 2002*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 20. Nomor 1. Februari 2008
- Yasid, H Abu. 2013. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.

JURNAL/ARTIKEL

- Asdhie, B., & Ista, E. 2019. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).

Bachtiar Baital. 2014. *Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Alam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta Selatan. Jurnal Cita Hukum.

CosmoGov. 2017. Studi, Program, *Ilmu Pemerintahan, Universitas Cendrawasih Papua, and Muliadi Anangkota, 'CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Klasisifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian Muliadi Anangkota'*, CosmoGov, 3.2

Dwi Tania. 2022. *Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pidana ITE Oleh Presiden Melalui Keputusan Presiden (KEPPRES)*. Mataram. Jurnal Kertha Semaya. Vol.10 No.4. hlm. 861-880

Evi Purnamawati. 2020. *Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden*. Palembang. Fakultas Hukum Universitas Palembang. Halaman 64-77

Fahmi, K. (Ed). *Pengisian jabatan publik dalam ranah kekuasaan eksekutif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016

Heri Suandi Banurea. 2020. *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Banda Aceh

H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi. 2016. *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, (Jurnal Ilmiah Media Hukum).

Ina Helianny dan Edy Santoso. 2021. *Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta Timur. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular. Volume 5 Nomor 2

Isneni Fadhilah. 2022. *Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol 2 Nomor 1. hal 1-13

Khairunnisah. 2022. *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi*. Riau. Fakultas Syariah.

Limey Agus Fazlli Banurea. 2013. *Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Departemen Hukum Pidana, USU.

Mei Susanto. 2016. *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015*, Jurnal Yudisial Volume 9 No. 3.

Najwan, Johni, 2013. *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1*. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, 2013

Sutanto Mei, 2016 *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Hukum.

Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. hal 109-110.

Siti Rakhma Mary Herwati, 2015. *Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan*, Sajogyo Institute's Policy Paper No.1, Bogor: Sajogyo Institute.

Sinta Kartika Putri. 2021. *Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dalam Memberikan Amnesti Menurut fiqh Siyasah*. Banda Aceh. Fakultas Syar'iah dan Hukum

Siti Rakhma Mary Herwati, Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan, Bogor: Policy Paper Sajogyo Institute No. 1, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, Tahun 1959)

Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Lembaran Negara Nomor 146 Tahun 1954. Tambahan Lembaran Negara Nomor 730).

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi.

Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar Di Sulawesi Selatan, Yang Telah Melaporkan Dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetap.

Keputusan Presiden Nomor 568 Tahun 1961 tentang Tindakan Imbangan Terhadap Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Pemberontak/Gerombolan, Yang Menyerah Tanpa Syarat Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961.

Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 1962 tentang Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 658 Tahun 1961 Mengenai Penerimaan Anggota Front Nasional Dari Golongan Politik dan Karya.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1977 tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan Fretelin Di Timor Timur.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti Atau Abolisi.

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Beberapa Terpidana Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2000 tentang Pemberian Remisi.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

